

ABSTRAK

Bidang Kelautan dan Perikanan harus mampu memberi kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan daerah terutama bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir. Pati merupakan salah satu kabupaten penghasil ikan terbesar di Jawa Tengah. Pemerintah daerah Pati melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya dengan menjalankan urusan pemerintahan yang wajib dan memilih urusan kelautan dan perikanan menjadi urusan pilihan yang akan dijalankan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif analisis. Data diperoleh adalah data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang digunakan oleh penulis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil yang diperoleh dalam tulisan Hukum ini dalam penelitian yaitu 1). Lembaga/badan yang menjalankan urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Pati adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati yang mempunyai kedudukan sebagai pembantu Bupati sebagai kelautan dan perikanan berfungsi; 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; 2) Pelaksanaan Kebijakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; dan 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas, dan wewenang; 2) program/kegiatan dalam pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Pati salah satunya program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat, serta pengembangan budidaya perikanan adapun programnya adalah peningkatan budaya kelautan dan budaya maritim; 3) sumber keuangan untuk urusan program Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan urusan pemerintah. Urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran pada bulan Januari – September 2017 jumlah anggaran dinas Kelautan dan Perikanan dengan total Rp 15.330.286.00,- dan telah terealisasi sejumlah Rp 7.519.190.339,- 4), dalam pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan Perikanan masih mengalami hambatan serta Dinas Kelautan dan Perikanan juga melakukan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Hasil penelitian ini disarankan diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati terlebih dahulu membuat rencana kerja dimana didalamnya ditentukan sasaran dengan tujuan. Selain itu, didalam penyusunan anggaran biaya operasional sebaiknya dilakukan perencanaan yang matang dengan melakukan pengecekan ulang anggaran sebelum anggaran diajukan dan dipertimbangkan kembali faktor-faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi terjadinya perubahan dan penyusunan anggaran.

Kata kunci : Pelaksanaan, urusan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Pati

ABSTRACT

Field of Marine and Fisheries should be able to contribute more to the development for coastal communities. Pati is one of the largest fish producing regencies in Central Java. Pati local government runs regional autonomy with the extent of mandatory government and choose the affairs of marine and fisheries to be the choice to be executed.

The approach method used in this research is normative juridical research method. The research specification used in this research is descriptive analysis. The data obtained are secondary data obtained through literature study and interview. Data analysis used by writer by using method of qualitative analysis.

The results obtained in the writing of this Law in research that is 1). Institutions / bodies conducting maritime affairs and fisheries in Pati Regency are the Office of Marine and Fisheries of Pati Regency which has the position as the assistant of the Regent as a marine and fishery function; 1) Formulation of governmental affairs policy in the field of Marine and Fisheries; 2) Implementation of Governmental Affairs Policy on Marine Affairs and Fisheries; 3) Implementation of evaluation and reporting of government affairs in the field of Marine and Fisheries; and 4) Implementation of other functions provided by the Regent regarding tasks, and authority; 2) programs / activities in the implementation of Marine Affairs and Fisheries pursuant to Law Number 23 Year 2014 in Pati District one of the programs to increase marine cultural activities and maritime insight to the community, as well as the development of aquaculture as for its program is the improvement of maritime culture and maritime culture; 3) the financial resources for the program affairs of the Department of Marine Affairs and Fisheries are government affairs. The matters which are the duties of the regional government are financed under the burden of the Regional Revenue and Expenditure Budget. Budget in January - September 2017 total budget of Marine and Fishery Service with total Rp 15.330.286.00, - and has been realized amounting to Rp 7.519.190.339. - 4), in the implementation of Marine Affairs and Fisheries, Marine Fisheries Office still experiencing barriers and the Department of Marine and Fisheries also make efforts in overcoming these obstacles. The results of this study suggested that the Department of Marine Affairs and Fisheries Pati Regency first create a work plan in which the target is determined with goals. In addition, in the preparation of operational cost budget should be done carefully planning by doing a re-check budget before the budget is filed and reconsidered factors that if it can affect the occurrence of changes and budget recheck before the budget is submitted and factors that can influence each other behind.

Keywords: *Implementation, affairs, Department of Marine and Fisheries, Pati Regency*